

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT. EI ATAS TINDAKAN AB
YANG MELAKUKAN PENAMBANGAN MELEBIHI AREA YANG DIIZINKAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Nama : Frelicia Heidy Tuju

Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing : I. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

II. Dr. H. Didik Widitrisniharjo, S.H., M.Si.

ABSTRAK

Skripsi ini berisi penelitian yang bertujuan untuk dapat mengetahui apakah PT. EI bertanggungjawab secara pidana atas tindakan AB yang melakukan penambangan di hutan produksi melebihi area yang diizinkan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. PT. EI selaku korporasi bertanggungjawab secara pidana atas tindakan AB yang melakukan penambangan di hutan produksi melebihi area yang tercantum dalam IUP Operasi Produksi Berdasarkan Keputusan Bupati untuk menambang mineral logam berupa biji nikel di salah satu Provinsi di Indonesia seluas 40,04 Ha. PT. EI dalam melakukan kegiatan penambangan ternyata membawa alat berat berupa *excavator* dan *bulldozer* untuk melakukan kegiatan menebang dan merobohkan pohon-pohon di hutan produksi, di luar peta wilayah yang diizinkan untuk ditambang, sehingga terjadi perusakan hutan akibat tindakan tersebut. Korporasi yang berbuat dalam hal ini AB selaku Direktur PT. EI, maka pengurus dan korporasi yang bertanggungjawab secara pidana atas tindakan yang terjadi berdasarkan teori korporasi *Vicarious Liability* atau *Doktrine of Respondeat Superior* yaitu melakukan penambangan yang merusak hutan produksi akibat melewati area yang diizinkan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penambangan, Hutan

TITLE : CRIMINAL LIABILITY OF PT. EI FOR THE ACTION OF AB WHO
MINED BEYOND THE PERMITTED AREA IN VIEW OF THE LAW NUMBER
18 OF 2013 ON THE PREVENTION AND ERADICATION OF FOREST
DESTRUCTION

Name : Frelicia Heidy Tuju

Department/Study Program : Law/Legal Studies

Advisor : I. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

II. Dr. H. Didik Widitrisniharjo, S.H., M.Si.

ABSTRACT

This study contained a research to find out whether PT. EI could be held criminally accountable for the act of AB who mined in the production forest beyond the permitted area according to the Law Number 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction. PT. EI as the company should take responsibility for AB action of mining beyond the permitted area as stated in the IUP Production Operation based on the Decision of the Regent to mine metal mineral in the form of nickel seeds in one of the Province in Indonesia the size of 40,04 Ha. PT. EI in their mining activity turned out to use heavy machinery such as excavator and bulldozer in order to cut the trees in the production forest, outside the territory map allowed for mining, resulting in the forest destruction. The company directed by AB committed this act, so the management and the company were criminally liable for the act based on the corporate theory of Vicarious Liability or Doctrine of Respondent Superior which was mining and destructing production forest beyond the permitted area.

Keywords : Criminal Liability, Mining, Forest